

SUBBAG HUMAS DAN TATA USAHA

BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Berita	: Dana Hibah disalurkan Rp 72,5 Juta per RW
Entitas / Cakupan	: Kota Cimahi
Sumber / Hal	: Pikiran Rakyat / Hal.2
Edisi	: Kamis, 28 juni 2018

Dana Hibah Disalurkan Rp 72,5 Juta per RW

CIMAHI, (PR).-

Dana hibah per RW yang merupakan janji kampanye Wali Kota-Wakil Wali Kota Cimahi Ajay M Priatna-Ngatiana bakal segera didistribusikan Pemkot Cimahi. Namun, nilai bantuan dari semula Rp 100 juta ditetapkan Rp 72,5 juta mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Menurut Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Pemerintah Kota Cimahi Maria Fitriana, dana hibah RW akan disalurkan dalam waktu dekat. Sebelum dana tersebut didistribusikan, terlebih dahulu akan dilakukan bimtek oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).

"Teknisnya, pengajuan dari setiap RW dalam bentuk proposal disampaikan ke kelurahan dan kecamatan. Kemudian, dilakukan penyesuaian dan bimtek oleh Dinas PUPR mengenai usulan program dari setiap RW," ujarnya, Rabu (27/6/2018).

Jumlah RW se-Kota Cimahi sebanyak 312 RW. Dana hibah ini, kata dia, sebetulnya sudah bisa diberikan sebelum Lebaran 2018, tetapi pihaknya masih menyusun teknis pencairan.

"Memang masih bingung, apakah harus lelang atau penunjukan langsung. Setelah berbagai pertimbangan, kami pikir tidak perlu seperti itu. Ini kan merupakan bentuk pemberdayaan masyarakat. Jadi, kalau proposal sudah masuk, dana bisa dicairkan dan dikerjakan swadaya masyarakat," katanya.

Menurut dia, dana hibah tersebut peruntukannya disesuaikan dengan konsep yang diajukan masing-masing RW. Artinya, tidak ditentukan oleh pemerintah, tetapi sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat.

"Tidak ada biaya tukang, tenaganya bisa swadaya masyarakat. Berbeda untuk makan minum (mamin), masih bisa kita anggarkan. Setelah melalui penyesuaian di Dinas PUPR, masyarakat tinggal berbelanja di toko material di sekitar lingkungan mereka," katanya.

Dia menjelaskan, jika pada tahun 2018 dana tersebut tidak terserap, tidak bisa diakumulasikan pada tahun mendatang. "Kalau tidak terserap, berarti tidak bisa ditambahkan dengan dana yang akan diberikan tahun mendatang. Makanya, pihak kelurahan dan kecamatan mendorong masyarakat untuk mengajukan sesuai dengan kebutuhannya," ujarnya.

Dana ini, kata dia, bukan hanya untuk infrastruktur, melainkan noninfrastruktur jika sesuai dengan kebutuhan masyarakat di lapangan. Jadi, masyarakat yang membuat konsep dan desain pembangunan.

Menurut dia, konsep ini merupakan kebalikan dari konsep lama yang pernah diterapkan Pemkot Cimahi. Pihaknya ingin memberdayakan sekaligus membangun kemandirian masyarakat. Harapannya, program tersebut mendorong pemberdayaan dan membangun kemandirian masyarakat.

"Semua sudah diplot. Nanti kelurahan yang mengatur berapa besarnya, usulannya seperti apa, dan jadwalnya kapan. Karena tiap RW kegiatannya pasti berbeda, tidak mungkin serentak. Diharapkan, program ini bisa mencapai tujuannya untuk pemberdayaan masyarakat. Penyerapannya disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat," ucapnya. **(Ririn NF)*****